

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Definisi dari diplomasi budaya ialah pertukaran ide maupun seni kebudayaan di antara negara dan masyarakatnya yang tujuan utamanya untuk memperkuat rasa kesadaran akan budaya satu sama lain. Goff berkata bahwa diplomasi budaya membantu membuka komunikasi baru walaupun tidak dapat mengubah kebijakan yang sudah lama mengakar dan diplomasi budaya ini dapat memberikan kesempatan dalam membangun relasi dengan negara lain (Angesti, 2024).

Diplomasi budaya ini memiliki peran yang sangat penting dalam melaksanakan kebijakan luar negeri, hal ini bukan berarti berfungsi sebagai sebuah alat yang kegunaannya bermanfaat dalam mewujudkan suatu kepentingan nasionalnya di negara lain pada bidang kebijakan budaya, tetapi juga menjadi bagian pada penciptaan kondisi yang sangat menguntungkan bagi pencapaian yang signifikan dari tujuan kebijakan luar negeri suatu negara di bidang lainnya contohnya pada ekonomi. Korea Selatan merupakan negara yang terkenal dengan kegiatan diplomasi budayanya yang kuat. Negara Korea Selatan dengan kapasitas *hard power* yang masih terbatas terus menerus melakukan kegiatan diplomasi budaya yang bertujuan untuk memperkuat ya ke negara lain dan juga memperkuat *soft power* negaranya (Angesti,



Kegiatan diplomasi budaya ini berhasil membantu Korea Selatan dalam membangkitkan negaranya dan mulai dikenal dimana menjadi salah satu negara yang begitu kuat dan berpengaruh. Korea Selatan mulai mengatur kebijakan luar negeri yang dapat mengambil peran besar dalam sebuah lembaga internasional yang berguna bagi tata kelola dunia. Korea Selatan berupaya memberikan citra positif negaranya melalui diplomasi budaya meski membutuhkan waktu yang cukup lama. Berawal di tahun 1990-an, Korea Selatan berupaya memanfaatkan aspek-aspek kebudayaannya yang disebut dengan *Hallyu* untuk meningkatkan perekonomian negaranya. (Angesti, 2024). *Hallyu* ini mencakup berbagai macam seperti musik, film, animasi, tarian, penampilan, lukisan, fashion, kuliner, dan teknologi (Goldev, 2023).

Hallyu yang dikenal dengan musiknya yang sangat populer yang disebut dengan istilah K-pop. Adanya fenomena K-pop ini dapat menjadi salah satu produk budaya Korea Selatan yang membantu mengembangkan perekonomian negaranya. Tidak hanya itu, perkembangan teknologi juga menjadi salah satu media yang membantu menyebarluaskan atau mempromosikan produk budaya dari Korea Selatan untuk ditunjukkan kepada seluruh dunia (Angesti, 2024).

Penyebaran *Hallyu* di luar negeri sebenarnya dimulai pada tahun 1994 ketika Kim Young-sam yang merupakan presiden Korea Selatan saat itu mendeklarasikan globalisasi sebagai visi nasional dan sasaran strategi pembangunan. Rencana ini kemudian di implementasikan oleh Menteri Budaya

saat itu yaitu Shin Nak-yun yang menetapkan abad tersebut sebagai "abad budaya." Berbagai upaya dilakukan untuk mencapai globalisasi budaya



Korea Selatan termasuk menjaga warisan budaya tradisional Korea Selatan agar lebih diterima oleh publik internasional, melatih tenaga profesional di bidang seni dan budaya, memperluas fasilitas budaya di daerah lokal, mendirikan pusat budaya di luar negeri, serta mengembangkan jaringan komputer dan internet di seluruh negeri untuk mendukung penyebaran informasi budaya (Nastiti, 2010).

Setelah memasuki era globalisasi, perkembangan teknologi semakin berkembang pesat sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengakses internet dimana saja melalui *smartphone* mereka. Masyarakat dapat mengenal drama maupun film dan mendengarkan musik K-pop melalui platform online yang tidak memiliki batas dan dapat diakses di seluruh dunia (Lawrence, Iyas. 2022).

Hallyu ini tidak hanya memperkuat pengaruh budaya Korea Selatan tetapi juga berkontribusi pada perkembangan ekonominya dan menempatkan negara ini sebagai peran utama dalam industri hiburan global. Popularitas dari budaya Korea Selatan di negara – negara seperti Tiongkok yang berpotensi mendorong hubungan diplomatik dan budaya yang lebih baik dimana ini menciptakan dasar untuk kolaborasi dan pemahaman di masa depan antara negara lain (Lee, 2011) .

Hallyu ini pertama kali dipopulerkan oleh jurnalis di Tiongkok untuk menggambarkan seberapa terkenalnya K-pop yang begitu cepat menyebar.

Fenomena ini dimulai pada tahun 1997 dengan penayangan seri K- drama yang

judul “What is Love About?” oleh stasiun televisi nasional Tiongkok yaitu Tiongkok Central Television (CCTV). Karena banyaknya permintaan maka



drama diputar ulang pada tahun 1998. Sejak saat itu juga seri K-drama lainnya menjadi populer dan mendapatkan tempat di hati penonton bukan hanya di Tiongkok saja tetapi juga di negara – negara Asia dengan komunitas Tiongkok yang besar seperti Hong Kong, Taiwan dan Vietnam (Muhammad, 2021).

Tingkat popularitas yang tinggi serta dukungan dari masyarakat luar negeri membantu Korea Selatan untuk memperluas lapangan kerjanya yang dapat mengembangkan perekonomiannya. Hal ini menjadi kesempatan bagi masyarakat Korea Selatan dalam melakukan *soft diplomacy* semakin luas (Chairunnisa, 2021). Dampak dari *Hallyu* ini telah mempengaruhi pandangan tentang Korea Selatan dinegara - negara tetangga dan diseluruh dunia. Hal ini juga mengubah citra nasional Korea Selatan mulai dari yang berkaitan dengan konflik sejarah dan perjuangan ekonomi menjadi kekuatan budaya yang dinamis (Lee, 2011).

Pemerintah Korea Selatan juga secara aktif mendukung ekspor produk budayanya dengan mengakui potensinya dalam meningkatkan reputasi global negara dan pertumbuhan ekonomi. Dukungan strategis ini juga telah memfasilitasi penyebaran hiburan Korea Selatan secara internasional (Lee, 2011). Hilangnya batasan-batasan membuat budaya Korea Selatan semakin mendunia. Di tahun 90-an, Korea Selatan mulai mengembangkan industri kreatifnya yang didukung oleh pemerintah untuk mendorong budaya, seni, serta

nya. Perkembangan tersebut ditandai dengan beberapa tahun setelahnya, Korea Selatan sukses mendirikan tiga agensi besar yang dikenal sebagai “The



Big Three” yang terdiri atas SM Entertainment, YG Entertainment, dan JYP Entertainment yang menjadi pelopor agensi – agensi yang ada di Korea Selatan saat ini (Lawrence, Iyas. 2022).

Fenomena budaya yang dikenal sebagai *Hallyu* meninggalkan jejak yang tak terlupakan di seluruh Asia, mengobarkan optimisme tentang potensi negara ini sebagai pembangkit budaya. Meskipun *Hallyu* telah menyebar ke banyak negara Asia, tidak diragukan lagi bahwa *Hallyu* ini telah menemukan kesuksesan terbesar di Tiongkok (Jang. 2012).

Istilah dari *Hallyu* awalnya berasal dari Tiongkok yang dengan terjalannya hubungan diplomatik antara Republik Korea dan Republik Rakyat Tiongkok di tahun 1992 dimana ketika banyak film dan acara TV Korea Selatan mulai disiarkan di televisi Tiongkok. Istilah *Hallyu* muncul pada tahun 1999 untuk merujuk pada kesuksesan acara TV Korea Selatan di negara Tiongkok. Dari sinilah merupakan titik awal dari penyebaran fenomena yang melibatkan reformasi televisi Korea Selatan untuk fokus kepada sumber daya dalam mengembangkan budaya pop Korea Selatan. Serial drama dan musik K-pop menghasilkan banyak ketertarikan dan pada awal abad ke – 21 telah menyebar hingga ke Tiongkok jadi tidak diragukan lagi bahwa *Hallyu* ini aktif membantu perkembangan pariwisata (Glodev, 2023).

Hubungan politik yang terjadi antara Korea Selatan dan Tiongkok ini sangat kompleks dan telah mengalami perubahan yang begitu signifikan selama tahun – tahun. Awal hubungan diplomatik dari kedua negara ini dimulai tahun 1983 dan hubungan ini berkembang melalui beberapa tahap dan



telah melewati banyak konflik salah satunya adalah “Program Nuklir Korea Utara” dimana ini merupakan salah satu konflik terbesar dalam hubungan bilateral, masalah ini menyebabkan ketegangan antara Korea Selatan dan Tiongkok hal ini dikarenakan Tiongkok yang khawatir akan stabilitas semenanjung Korea Selatan dan potensi dampaknya terhadap keamanannya sendiri. Konflik lain yang terjadi yaitu bantuan militer Amerika Serikat kepada Korea Selatan yang dipandang sebagai sebuah ancaman oleh negara Tiongkok dan menyebabkan ketegangan dan perselisihan diplomatik antara kedua negara ini (Mamchii, 2023).

Setelah meningkatnya ketegangan terkait program nuklir Korea Utara, Korea Selatan dan Tiongkok telah berusaha untuk menjaga stabilitas di kawasannya tersebut. Negara Tiongkok yang sebagai sekutu utama Korea Utara memiliki kepentingan untuk mencegah konflik yang lebih besar sementara itu Korea Selatan berfokus pada keamanan nasional dan perlindungan dari ancaman nuklir. Meskipun ada ketegangan, kedua negara menyadari pentingnya dialog untuk mengurangi risiko konflik. Hubungan antara Korea Selatan dan Tiongkok setelah konflik nuklir ini telah mengalami dinamika yang begitu kompleks dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk budaya. Meskipun terdapat tantangan tetapi Korea Selatan dan Tiongkok justru memiliki potensi untuk memperkuat hubungan mereka melalui dialog dan kerjasama di berbagai bidang sambil tetap mengelola ketegangan yang ada (Lee, 2011).



Liputan berita menunjukkan hubungan yang berkembang dari arakat Tiongkok yang mengagumi masyarakat Korea Selatan. Masyarakat

Tiongkok merasa lebih dekat dengan budaya Korea Selatan berkat akses ke budaya pop, bahkan jika mereka belum pernah ke negara itu. Republik Korea Selatan dan Tiongkok telah mempertahankan hubungan kerja sama yang erat di bidang politik, ekonomi, budaya, dan pendidikan dalam beberapa tahun terakhir. Menurut statistik resmi Korea Selatan yang dipublikasikan, Tiongkok menempati peringkat nomor satu dalam perdagangan luar negeri tahunan Korea Selatan dan juga telah menjadi mitra dagang terbesar ketiga bagi Tiongkok, di luar bidang ekonomi. Hubungan politik dan ekonomi yang begitu erat kerjasamanya telah menyebabkan seringnya pertukaran warga negara antara kedua negara (Jang, 2012).

Hallyu di Tiongkok menunjukkan masa depan yang lebih cerah untuk hubungan bilateral. Hal ini dikarenakan permintaan akan budaya pop Korea Selatan di Tiongkok dan berhasil memasuki pasar yang besar. Masuknya budaya Korea Selatan ke Tiongkok secara satu arah membuat mereka menciptakan peningkatan ketidakseimbangan dalam perdagangan budaya kedua negara. Oleh karena itu, mempertahankan *Hallyu* ini di Tiongkok untuk waktu yang lama merupakan hal yang penting untuk pembentukan perdagangan (Jang, 2012).

Hallyu memiliki implikasi yang sangat signifikan terhadap hubungan Korea Selatan dan Tiongkok karena *Hallyu* ini mempengaruhi persepsi masyarakat Tiongkok terhadap Korea Selatan. Perlu digarisbawahi bahwa

signifnya *Hallyu* dari dua perspektif yaitu hubungan komunikasi budaya dan dinamisasi budaya. Ketika *Hallyu* mulai menarik perhatian di awal tahun



2000-an, Korea Selatan sendiri menarik perhatian khusus bagi Tiongkok. Masyarakat Tiongkok begitu merasakan kehadiran Korea Selatan yang begitu kuat hal ini dikarenakan, mereka terpapar dengan acara televisi, film, dan lagu dari Korea Selatan dalam kehidupan sehari-hari (Jang, 2012).

Pengaruh dari *Hallyu* ini tidak hanya pada musik tetapi juga pada gaya hidup para penggemar di Tiongkok. Para remaja menata diri mereka seperti penyanyi Korea, meniru gaya berpakaian serta mengenakan perhiasan yang sama. Tiongkok telah ikut berkontribusi dalam masuknya K-pop ke negara mereka (Jang, 2012). Efek lain dari yaitu *Hallyu* masuknya acara TV, film serta lagu Korea Selatan dengan begitu cepat berkat dari inovasi dalam teknologi informasi dan komunikasi. Kegemaran akan *fashion* Korea Selatan, perawatan kecantikan dan operasi plastik juga merupakan salah satu contoh fenomena yang masuk ke Tiongkok (Jang, 2012).

Korea Selatan yang telah dikenal identik dengan modis atau bergaya ini telah mempengaruhi kaum muda Tiongkok seperti busana, warna rambut, model rambut serta sepatu platform para artis Korea Selatan juga menjadi barang yang populer di Tiongkok. Di kota – kota besar seperti Beijing juga banyak membuka toko yang secara khusus menjual pakaian dan aksesoris dari Korea Selatan. Melalui ini juga banyak brand pakaian dari Korea Selatan mulai berekspansi ke pasar Tiongkok. Di kalangan wanita Asia, banyak meniru gaya riasan para artis dan telah menjadi trend bagi mereka, tidak sedikit juga dari mereka yang datang ke Korea Selatan untuk melakukan operasi plastik (Jang, 2012).



Tidak peduli bagaimana budaya pop Korea dievaluasi oleh masyarakat Tiongkok, tidak diragukan lagi berkontribusi pada hubungan Korea Selatan – Tiongkok dengan membantu masyarakat Tiongkok dalam membangun komunikasi atau keakraban terhadap Korea. Meskipun ini tetap ada berbagai elemen yang membantu membangun keakraban ini. Ada dua elemen yang menonjol yaitu terkait dengan masa lalu yang dimiliki kedua negara, yang mana masyarakat Tiongkok sebut sebagai budaya Timur. Menurut masyarakat Tiongkok, budaya Timur terlihat dalam budaya pop Korea seperti yang diambil TV Korea Selatan (Jang, 2012).

Dari sudut pandang persepsi masyarakat Tiongkok terhadap Korea Selatan, kontribusi *Hallyu* terhadap peningkatan hubungan Korea Selatan dan Tiongkok ini sangatlah besar. Hubungan antara kedua negara telah diuntungkan dari atmosfer yang menguntungkan yang dibangun dari menumbuhkan kedekatan budaya di antara masyarakat Tiongkok (Jang, 2012).

Terdapat beberapa alasan mengapa *Hallyu* dapat menjadi jendela yang berguna bagi hubungan Korea Selatan dan Tiongkok. Pertama-tama, sebagai sebuah fenomena budaya, *Hallyu* dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap persepsi Korea oleh masyarakat Tiongkok. Budaya populer Korea Selatan itu sendiri merupakan saluran utama di mana masyarakat Tiongkok memperoleh informasi dan membangun citra masyarakat Korea Selatan dan dalam hal ini, dapat memiliki implikasi budaya yang substansial bagi hubungan

1 Selatan dan Tiongkok. Kedua, sebagai fenomena yang terkait erat dengan tri budaya. Hal ini akan memungkinkan untuk melihat dengan jelas



persilangan kerja sama ekonomi dan persaingan antara industri Korea Selatan dan Tiongkok. Ketiga, *Hallyu* berfungsi sebagai lahan yang subur bagi politik budaya, *Hallyu* melampaui ranah budaya populer dan ekonomi dan sering kali terjerat dengan kebanggaan nasional, nasionalisme budaya, dan sejenisnya. Dalam hal ini, *Hallyu* memiliki implikasi politik yang penting bagi hubungan Korea Selatan – Tiongkok (Jang. 2012).

Hallyu dianggap sebagai hal yang sangat penting bagi perekonomian kedua negara. Sejak terbukanya Tiongkok, selera masyarakat Tiongkok terhadap budaya baru semakin luas. Hal ini menyebabkan ekspansi yang cepat dalam industri budaya. Permintaan konsumen Tiongkok untuk produk budaya berkembang dengan cepat dan jumlah produk budaya domestik telah berkembang pesat di Tiongkok. Namun tidak cukup untuk memenuhi permintaan konsumen yang terus meningkat (Jang, 2012).

Ketika pasar Tiongkok dimana perusahaan – perusahaan media mulai membutuhkan program – program yang membantu bertahan dalam persaingan, masuklah drama Korea, film serta musik pop Korea Selatan dan ini disambut sangat baik oleh Tiongkok. Membahas tentang implikasi terhadap hubungan Korea Selatan – Tiongkok, *Hallyu* bagaikan pisau bermata dua. Hal ini dapat menyebabkan konflik dan juga dapat mendorong kolaborasi. Industri budaya Korea Selatan dan Tiongkok akan terus bersaing dan bekerja sama karena mereka beradaptasi dengan perubahan yang cepat dipasar domestik, regional

lobal. *Hallyu* ini mengingatkan pada latar belakang budaya mereka yang yaitu budaya Timur yang didasarkan pada tradisi Konfusianisme dan



iniilah yang membuat mereka menyadari bahwa memiliki banyak kesamaan dalam kehidupan sehari-hari (Jang, 2012).

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada analisis dampak diplomasi budaya Korea Selatan dan Tiongkok dalam periode 1990an hingga tahun 2024. Fokus utama akan diberikan pada strategi diplomasi budaya yang diterapkan oleh kedua negara serta pengaruhnya terhadap persepsi masyarakat internasional, peningkatan pariwisata, dan ekspansi industri hiburan. Penelitian ini tidak akan membahas aspek diplomasi politik atau ekonomi secara mendalam, serta tidak mencakup analisis terhadap negara lain di luar Korea Selatan dan Tiongkok.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana diplomasi budaya Korea Selatan terhadap Tiongkok?
2. Apa dampak diplomasi budaya Korea Selatan terhadap hubungan bilateral Korea Selatan – Tiongkok ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui diplomasi budaya Korea Selatan terhadap Tiongkok
2. Untuk menganalisis dampak diplomasi budaya Korea Selatan terhadap hubungan bilateral Korea Selatan - Tiongkok

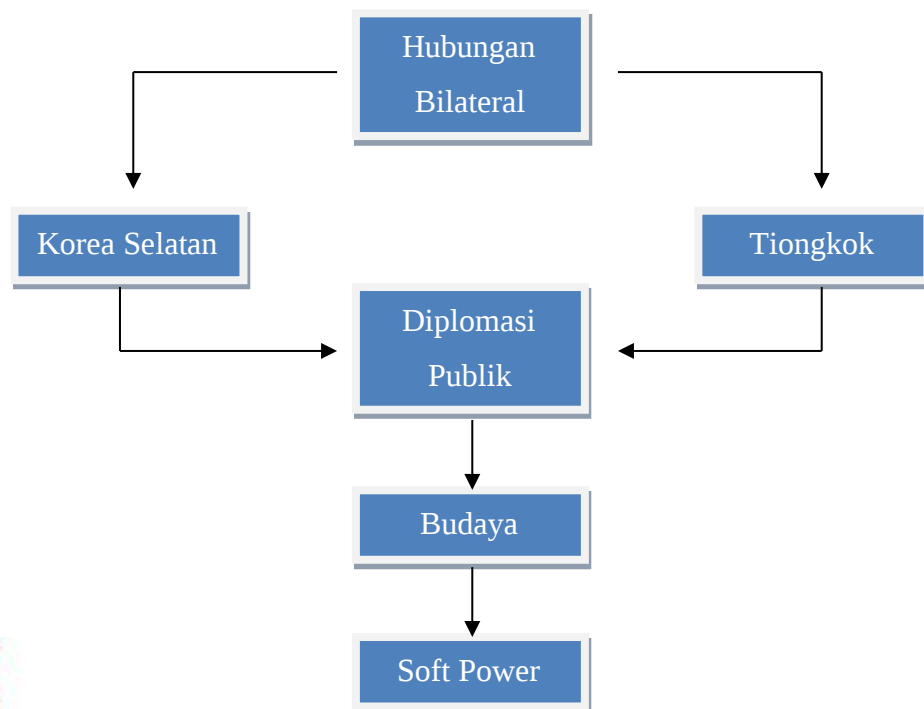


Adapun manfaat dari penelitian ini yang dilakukan penulis yaitu sebagai berikut:

1. Dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana diplomasi budaya Korea Selatan mempengaruhi hubungan bilateral antara Korea Selatan dan Tiongkok. Ini dapat membantu dalam mengevaluasi sejauh mana pertukaran budaya memengaruhi persepsi masyarakat dan pemerintah kedua negara terhadap satu sama lain.
2. Dapat memberikan informasi atau pengetahuan mengenai dampak dari diplomasi budaya Korea Selatan terhadap hubungan kedua negara yaitu Korea Selatan dan Tiongkok.

D. Kerangka Konseptual

Gambar 1. Skema Kerangka Konseptual.



Sumber: Penulis 2024.



1. Hubungan Bilateral

Hubungan bilateral adalah interaksi antara dua negara yang mencakup berbagai aspek seperti politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Istilah ini merujuk pada kerjasama dan komunikasi yang terjadi antara dua negara dalam upaya untuk mencapai tujuan bersama atau menyelesaikan isu-isu tertentu. Elemen utama dalam hubungan bilateral ini salah satunya adalah pertukaran budaya seperti program pertukaran pelajar dan festival seni yang dapat memperkuat hubungan bilateral (Lee, 2011).

Hubungan Bilateral berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Plano dan Olton (Rachmayanti, 2013) : “Hubungan kerjasama yang terjadi antara dua negara di dunia ini pada dasarnya tidak terlepas dari kepentingan nasional masing-masing negara. Kepentingan nasional merupakan unsur yang sangat vital mencakup kelangsungan hidup bangsa dan negara, kemerdekaan, keutuhan wilayah, keamanan, militer dan kesejahteraan ekonomi” (Rachmayanti, 2013).

Hubungan bilateral mencakup dua aspek penting, yaitu konflik dan kerjasama. Kedua aspek ini dapat bergantian memiliki arti penting sesuai dengan motivasi internal dan opini yang ada di kedua negara. Hubungan bilateral yang terbentuk antara dua negara bertujuan untuk mengatasi masalah yang muncul di antara mereka. Seperti yang dikemukakan oleh Coplin bahwa: Melalui adanya kerjasama internasional negara-negara berusaha untuk memecahkan permasalahan ekonomi, sosial dan politik. Ada dua tipe dalam kerja sama internasional. Tipe pertama berhubungan



dengan kondisi di lingkungan internasional yang memerlukan pengaturan khusus agar tidak menimbulkan ancaman bagi negara-negara yang terlibat. Tipe kedua mencakup situasi ekonomi, sosial, dan politik tertentu yang dianggap memiliki dampak luas terhadap sistem internasional, sehingga dipandang sebagai masalah bersama di tingkat internasional (Rachmayanti, 2013).

Pada penjelasan diatas, penulis mengfokuskan pada hubungan kedua negara. Ini memberikan kesempatan untuk fokus pada kepentingan dan kebutuhan bersama antara Korea Selatan dan Tiongkok yang dapat menarik perhatian dunia dan mengubah perekonomian negaranya.

2. *Diplomasi Publik*

Diplomasi publik diartikan sebagai proses komunikasi antara pemerintah dan publik internasional dengan tujuan memberikan pemahaman mengenai negara, sikap, institusi, budaya, kepentingan nasional, dan kebijakan yang diambil oleh pemerintahannya (Hennida, 2009). Diplomasi publik mengacu pada proses di mana suatu negara atau entitas terlibat dengan publik asing yang lebih luas untuk membangun kepercayaan dan pemahaman di luar hubungan pemerintah tradisional. Hal ini melibatkan berbagai upaya yang disponsori oleh pemerintah yang bertujuan untuk berkomunikasi secara langsung dengan publik asing untuk menginformasikan, mempengaruhi, dan membangun dukungan untuk tujuan strategis. Diplomasi publik mencakup kegiatan seperti konferensi pers, pertukaran budaya, program pendidikan, dan penjangkauan media,



yang semuanya dirancang untuk membentuk opini publik dan mendorong pemahaman dan kerja sama internasional (Britannica, 2024).

Definisi sebagaimana dikemukakan menurut Jan Mellisen (Hennida,2009) mendefinisikan bahwa diplomasi publik sebagai upaya mempengaruhi orang atau organisasi di luar negeri dengan cara positif sehingga mengubah pandangan mereka tentang suatu negara. Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa diplomasi publik berfungsi untuk mempromosikan kepentingan nasional melalui pemahaman, informasi, dan pengaruh terhadap publik internasional. Oleh karena itu, diplomasi publik merupakan salah satu instrumen *soft power* (Hennida,2009).

Diplomasi publik bersifat transparan dan menjangkau khalayak luas, sedangkan diplomasi tradisional cenderung tertutup dengan jangkauan terbatas. Diplomasi publik disampaikan dari pemerintah ke publik internasional. Selain itu, diplomasi resmi (jalur pertama) berfokus pada tindakan dan kebijakan pemerintah, sementara tema dan isu dalam diplomasi publik lebih berhubungan dengan sikap dan perilaku masyarakat (Hennida,2009).

3. *Soft power*

Soft power mengacu pada kemampuan suatu negara atau organisasi untuk mempengaruhi tindakan dan perilaku orang lain melalui cara yang npa paksaan, seperti budaya, nilai-nilai, dan ide-ide. *Soft power* adalah



kemampuan untuk membentuk preferensi orang lain melalui daya tarik, bukan paksaan atau pembayaran (Nye, 2004).

Karakteristik utama *Soft power* meliputi non-koersif yang mana *soft power* bergantung pada persuasi, daya tarik, dan kerjasama daripada paksaan atau kekuatan untuk mencapai tujuannya, selanjutnya budaya dan ideologi yang mana *soft power* sering melibatkan promosi budaya, nilai-nilai, dan ide-ide suatu negara untuk mempengaruhi tindakan dan keyakinan orang lain, Ketiga, jangka Panjang yaitu *soft power* dapat memiliki efek jangka panjang, karena membentuk opini publik dan mempengaruhi cara orang berpikir tentang suatu negara atau organisasi, dan yang terakhir multilateral. Dalam hubungan multilateral *soft power* sering melibatkan kerjasama dan kolaborasi dengan negara atau organisasi lain untuk mencapai tujuan Bersama (Nye, 2004).

Soft power dalam hubungan antara Korea Selatan dan Tiongkok ini mencakup berbagai aspek budaya, ekonomi, dan diplomatik yang memengaruhi interaksi kedua negara. Korea Selatan menggunakan budaya populer seperti K-Pop, drama, film, produk kecantikan, dan fashion untuk menarik perhatian Tiongkok, dan pariwisata juga memperkuat hubungan ini. Pertukaran budaya dan wisatawan dari kedua negara semakin mempererat hubungan bilateral ini, menciptakan pemahaman dan kerjasama yang lebih baik di berbagai bidang (Nye, 2004).



E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini, secara khusus penulis menggunakan teknik deskriptif yaitu penelitian dengan cara mendeskripsikan tentang keadaan berupa fakta-fakta yang masih relevan dengan argument atau pendapat. Sehingga dapat diuraikan dengan analisis yang berujung dengan kesimpulan. Tipe ini digunakan oleh penulis karena sesuai dengan kebutuhan penelitian dimana penulis akan mendeskripsikan atau menggambarkan fakta yang telah ditemukan tentang dampak diplomasi budaya Korea Selatan terhadap hubungan bilateral Korea Selatan – Tiongkok.

2. Jenis dan Sumber Data

Dalam tipe penelitian, semakin dalam, lengkap, serta tereksplorasi data yang diperoleh pun dapat diartikan semakin bagus kualitas penelitiannya. Jadi melalui perspektif banyak narasumber atau subjek riset, proses penelitian kualitatif lebih sedikit subjeknya dibandingkan penelitian kuantitatif karena mengutamakan ketajaman data dibandingkan kuantitas data.

Maka dari itu, Jenis penelitian yang digunakan penulis untuk mengkaji topik ini adalah penelitian kualitatif yang memfokuskan pada pemahaman tentang suatu masalah atau fenomena yang akan digambarkan secara deskripsi. Penelitian kualitatif mengacu pada pemahaman menyeluruh terhadap gejala yang dialami sasaran penelitian,



seperti perbuatan, pemahaman, dorongan, serta tindakan, melalui bentuk teks dan penggambaran (Moleong, 2018).

Sumber data yang digunakan oleh penulis yaitu sekunder dimana ini merupakan data yang telah dikumpulkan dan dilaporkan sebelumnya oleh individu atau instansi lain, meskipun data tersebut sebenarnya adalah data asli. Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti instansi, perpustakaan, atau pihak lain. Data sekunder mencakup dokumen resmi, buku, hasil penelitian, laporan, dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari jurnal, skripsi, serta data lain yang relevan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan studi pustaka (*library research*) yaitu metode dengan pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Pengumpulan data tersebut menggunakan cara mencari sumber dan mengonstruksi dari berbagai sumber contohnya seperti buku, jurnal dan riset yang sudah pernah dilakukan. Bahan pustaka yang didapat dari berbagai referensi tersebut dianalisis secara kritis dan harus mendalam agar dapat mendukung proposisi dan gagasannya.

4. Teknik Analisa

Teknik analisis data yang digunakan yaitu menggunakan teknik analisis kualitatif. Teknik ini digunakan agar permasalahan yang akan teliti bisa dianalisis dengan cara penggambaran berdasarkan pada fakta



yang ada sehingga bisa dihubungkan dengan fakta lain dan menghasilkan penjelasan dalam bentuk deskripsi yang tepat.



Optimized using
trial version
www.balesio.com

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hubungan Bilateral

Menurut Kusumohamidjojo, hubungan bilateral adalah bentuk kerja sama antara negara dengan negara, baik yang berdekatan secara geografis maupun yang terpisah lautan dengan tujuan utama menciptakan perdamaian melalui kesamaan dalam aspek politik, budaya, dan struktur ekonomi. Tercapainya hubungan bilateral sering kali melibatkan kesepahaman antara dua negara yang bekerja sama untuk memenuhi kepentingan nasional masing-masing dalam pelaksanaan politik luar negerinya (Ardiansyah, 2011).

Plano dan Olton berpendapat bahwa hubungan kerja sama antara dua negara pada dasarnya selalu berlandaskan kepentingan nasional masing-masing. Kepentingan nasional tersebut mencakup aspek-aspek vital seperti kelangsungan hidup bangsa, kemerdekaan, keutuhan wilayah, keamanan, militer, dan kesejahteraan ekonomi. Hubungan bilateral umumnya melibatkan aspek politik dan budaya dari kedua negara. Dalam hal ini, juga menekankan bahwa kerja sama lebih mudah dijalin di bidang kebudayaan dibandingkan bidang militer. Sebagai contoh, Korea Selatan memiliki peluang besar untuk mempererat hubungan kerja sama dengan Indonesia melalui kebudayaan, seperti musik, film, fashion, dan budaya populer lainnya. Pendekatan ini

ungkinkan terciptanya hubungan yang harmonis antarnegara melalui
tan budaya (Ardiansyah, 2011).



Hubungan bilateral dalam konteks hubungan internasional (HI) adalah kondisi yang dibentuk oleh suatu negara dengan negara lain di mana pendekatan persuasif yang baik digunakan untuk membangun citra positif, sehingga tercipta kerjasama antara aktor-aktor yang bertindak sebagai wakil dari masing-masing negara. Ruang lingkup hubungan internasional memang mencakup berbagai tipe interaksi antara negara-negara yang meliputi satu atau lebih sektor seperti sosial budaya, perdagangan, dan pariwisata. Tingkat berikutnya adalah interaksi kerjasama yang dibangun untuk menghindari kesenjangan dan konflik selama kerjasama tersebut yang kemudian dikelola dalam kerangka politik internasional. Komunikasi antar negara yang sedang berkonflik tetap penting untuk dipertahankan guna meminimalisir dampak negatif dari menurunnya hubungan diplomatik atau sebagai jalur untuk memulihkan hubungan formal (Ardiansyah, 2011).

Bilateralisme fokus pada hubungan politik dan sosial budaya yang terjadi antara dua negara. Dalam berbagai bentuk hubungan bilateral ada situasi di mana keberadaan dan fungsi kedutaan besar tidak dapat dipertahankan. Penutupan formal kedutaan besar terjadi ketika masalah timbul antara negara-negara tersebut. Oleh karena itu, pemutusan hubungan diplomatik merupakan bagian dari masalah politik dan konflik. Komunikasi antar negara yang sedang berkonflik tetap penting untuk dipertahankan guna meminimalisir dampak negatif dari menurunnya hubungan diplomatik atau sebagai jalur untuk

lihkan hubungan formal (Ardiansyah, 2011).



Bentuk pelaksanaan kerjasama bilateral antar negara adalah hasil dari keputusan yang diambil berdasarkan kepentingan masing-masing negara melalui diplomasi dan kebijakan luar negeri. Dalam konteks ini, hubungan tersebut harus dirancang agar saling melengkapi sehingga interaksi tersebut menghasilkan manfaat bagi kedua belah pihak. Menurut Juwondo, hubungan bilateral adalah interaksi antara dua negara yang dikembangkan dan ditingkatkan dengan menghormati hak-hak kedua negara untuk menjalin kerjasama dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, tanpa mengabaikan keberadaan masing-masing negara. Hal ini menunjukkan perdamaian dan memberikan nilai tambah yang menguntungkan dari hubungan bilateral tersebut (Ardiansyah, 2011).

Interaksi dalam hubungan bilateral melibatkan pengaruh dan respons, di mana pengaruh dapat langsung mengenai sasaran atau merupakan dampak dari tindakan tertentu. Akibatnya negara yang menjadi sasaran dari pengaruh tersebut baik langsung maupun tidak langsung juga akan dipengaruhi. Hal ini tampak dalam upaya suatu negara untuk mempengaruhi dan memaksa pemerintah negara lain agar menerima kehendak politiknya. Kerjasama bilateral dalam konteks hubungan internasional menggambarkan interaksi yang didasarkan pada kepentingan nasional masing-masing negara. Kepentingan ini bisa berasal dari dalam atau luar negeri yang bersangkutan, sehingga terjadi hubungan timbal balik berdasarkan kecenderungan sikap dan tujuan dari

masing-masing pihak yang berinteraksi (Ardiansyah, 2011).



B. Diplomasi Publik

Menurut KBBI, Diplomasi adalah penyelenggaraan hubungan resmi antara satu negara dan negara lain. Selain itu, diplomasi juga dapat diartikan sebagai urusan kepentingan sebuah negara yang dilakukan melalui perantara wakil-wakil di negeri lain. Kata diplomasi biasanya berkaitan dengan urusan budaya, ekonomi, dan perdagangan internasional. Diplomasi juga merupakan salah satu sarana yang digunakan oleh negara yang bertujuan melindungi suatu kepentingan negaranya sekaligus tetap menjalin hubungan baik dengan negara lain (Detik, 2023).

Diplomasi publik merupakan salah satu jenis diplomasi yang melibatkan upaya pemerintah yang mana dalam diplomasi public perlu dipahami bahwa proses diplomatisinya tidak hanya berlangsung di luar negeri, tetapi juga di dalam negeri. Diplomasi publik diartikan sebagai proses komunikasi pemerintah dengan publik mancanegara yang bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang negara, budaya, kepentingan nasional, dan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh negaranya. Tujuan dari adanya diplomasi publik ini adalah meliputi dua hal yaitu mempengaruhi perilaku dari negara bersangkutan dan memfasilitasinya. Karena hal inilah, perangkat penting dalam pelaksanaan diplomasi publik ialah *soft power* (Hennida, 2009).

Menurut Ranny Emilia, Diplomasi publik merupakan bentuk diplomasi yang mengedepankan keterbukaan di mana negara yang berdaulat bekerja sama in warga negara lain untuk mempengaruhi audiensnya. Hal ini dilakukan in terus mempromosikan kepentingan negara tersebut untuk menciptakan



pandangan positif terhadap pemimpin atau kebijakan luar negeri negara tersebut. Metode yang digunakan beragam, termasuk melalui film, buku, atau program televisi. Diplomasi publik termasuk dalam soft diplomacy yang tujuannya untuk membentuk citra positif suatu negara di mata publik internasional dengan menarik perhatian warga negara lain sehingga negara tersebut semakin dikenal oleh banyak orang. Dalam hal ini, diplomasi publik menggunakan berbagai alat bantu, baik perangkat lunak maupun cetak yang dijalankan oleh media, lembaga, individu, atau publik secara luas (Amalia, 2018).

Menurut Eytan Gilboa, diplomasi publik adalah bidang praktik dan kajian yang berkembang pesat terutama sejak abad ke-20 dimana ketika diplomasi mulai diperhatikan oleh media dan opini publik. Gilboa ini menjelaskan bahwa diplomasi publik menjadi lebih signifikan selama Perang Dingin, di mana negara-negara besar menggunakan berbagai alat untuk mendapatkan dukungan internasional dan membentuk opini publik di negara lain. Gilboa mendefinisikan diplomasi publik sebagai proses komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah untuk mempengaruhi pemikiran masyarakat asing dengan tujuan akhir mempengaruhi kebijakan pemerintah mereka. Ia menekankan bahwa diplomasi publik mencakup lebih dari sekadar propaganda atau hubungan masyarakat, ini melibatkan interaksi yang lebih kompleks antara negara dan aktor non-negara, serta penggunaan berbagai saluran komunikasi,

suk media massa dan internet (Gilboa, 2016).



Diplomasi publik meliputi semua tindakan yang dilakukan oleh aktor negara maupun non-negara yang berkontribusi pada penguatan *soft power* suatu negara. Keterlibatan pejabat negara sangat diperlukan dalam proses diplomasi publik ini dimana dapat dilaksanakan melalui berbagai cara termasuk pertemuan formal dan negosiasi dengan diplomat untuk mempengaruhi pandangan dan kebijakan negara lain. Ini merupakan salah satu alat yang digunakan pemerintah untuk berkomunikasi dan mengelola hubungan dengan negara lain, serta melindungi kepentingan nasional dengan menarik perhatian dari masyarakat di negara lain dan di dalam negeri (Veri Diana Baun Yuel et al. 2023).

Diplomasi publik berusaha menarik perhatian melalui sosialisasi, subsidi, ekspor, perdagangan, dan lain-lain. Namun, jika konten budaya, kebijakan, dan nilai-nilai yang disampaikan tidak menarik maka diplomasi publik tidak akan efektif dan tidak dapat berfungsi sebagai alat diplomasi budaya (Veri Diana Baun Yuel et al. 2023). Diplomasi publik merupakan upaya yang dilakukan oleh aktor negara untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat di luar negeri, organisasi non-pemerintah, dan individu asing, dengan tujuan memengaruhi persepsi serta opini mereka terhadap negara tersebut. Berbagai metode dapat digunakan dalam diplomasi publik, termasuk program pertukaran budaya, konser musik, pameran seni, program pendidikan, dan penggunaan media sosial.



Diplomasi budaya adalah salah satu aspek dari diplomasi publik yang kankan penggunaan elemen-elemen budaya seperti seni, musik, sastra,

film, dan warisan budaya lainnya. Tujuan dari diplomasi budaya adalah untuk mempromosikan dan menjalin kerja sama antara negara-negara. Kegiatan dalam diplomasi budaya mencakup pertukaran kebudayaan, pameran budaya, pertunjukan seni, festival, dan aktivitas lain yang bertujuan memperkenalkan kekayaan budaya suatu negara kepada masyarakat internasional. Melalui diplomasi budaya, diharapkan dapat memperkuat hubungan antarnegara dengan meningkatkan pemahaman dan penghargaan terhadap budaya masing-masing (Nobelis et al. 2017)

Gilboa juga mengidentifikasi beberapa karakteristik utama dari diplomasi publik adalah yang pertama interaktivitas yang mana melibatkan komunikasi dua arah antara negara dan masyarakat asing. Kedua, penggunaan *soft power* yang mempromosikan dan menjaga dengan baik reputasi suatu negara melalui daya Tarik dan persuasi. Terakhir yaitu, strategi yang terencana maksudnya adalah menggunakan penelitian opini publik yang bertujuan untuk merumuskan pendekatan yang lebih efektif dalam mencapai tujuan diplomatik (Gilboa,2016).

Menurut pendapat Jay Wang, menggambarkan diplomasi publik sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas komunikasi antara negara dan masyarakat. Dampaknya mencakup berbagai bidang, termasuk politik, ekonomi, dan sosial. Dalam pelaksanaannya, diplomasi publik tidak lagi di dominasi oleh pemerintah. Jay Wang juga melihat diplomasi publik sebagai

p multi dimensi yang mencakup tiga tujuan utama:



1. mempromosikan tujuan dan kebijakan negara,

2. bentuk komunikasi nilai dan sikap

3. sebagai sarana untuk meningkatkan pemahaman bersama dan

mutual trust antara negara dan masyarakat. Berdasarkan tujuan tersebut,

diplomasi publik menekankan pada pesan yang dapat dilakukan oleh siapa saja.

Sebagai bentuk partisipasi, perlu dibangun strategi komunikasi dalam diplomasi

publik, yaitu strategi komunikasi pemerintah untuk mengatur kekuatan-

kekuatan di dalam seperti menggunakan kelompok non-negara (MNC, NGO)

dan strategi komunikasi di luar dengan kelompok sasaran publik mancanegara

(Hennida, 2009).

Diplomasi publik telah mengalami perkembangan yang signifikan

sepanjang sejarah, bertransformasi dari praktik tradisional menjadi pendekatan

yang lebih modern dan inklusif. Berikut adalah penjelasan mengenai sejarah

diplomasi publik berdasarkan informasi yang tersedia.

1. Awal Mula Diplomasi Publik:

- Perang Dunia I dan Perang Dingin: Diplomasi publik mulai dikenal setelah Perang Dunia I dan menjadi lebih dominan selama Perang Dingin. Pada masa ini, istilah "*democratic diplomacy*" digunakan untuk menggambarkan usaha negara-negara Barat dalam mempengaruhi opini publik internasional.

- Pasca 1945: Setelah Perang Dunia II, banyak negara Eropa menerapkan diplomasi publik untuk membangun kembali citra mereka. Contohnya, Perancis menggunakan diplomasi untuk memulihkan citranya setelah



kekalahan dalam perang, sementara Belanda menerapkan pendekatan moral dalam diplomasi.

2. *Pengenalan Istilah Diplomasi Publik:*

Istilah "diplomasi publik" diperkenalkan oleh Edmund Gullion pada tahun 1965 di Fletcher School of Law and Diplomacy. Ia mendefinisikan diplomasi publik sebagai proses komunikasi pemerintah dengan publik internasional untuk menjelaskan kebijakan dan nilai-nilai negara.

3. *Perkembangan Teknologi dan Isu Global:*

Dengan kemajuan teknologi informasi, diplomasi publik menjadi lebih kompleks dan beragam. Isu-isu yang diangkat dalam diplomasi publik kini meliputi lingkungan, kesehatan, dan hak asasi manusia, bukan hanya fokus pada konflik militer. Dalam *soft power*, diplomasi publik berfungsi sebagai alat *soft power* yang memungkinkan negara untuk mempengaruhi perilaku negara lain melalui komunikasi yang efektif dan membangun kepercayaan.

4. *Tantangan dan Adaptasi*

Pasca 911: Setelah serangan teroris 11 September 2001, diplomasi publik kembali menjadi fokus utama dalam kebijakan luar negeri AS dan negara-negara lain. Namun, tantangan muncul ketika kredibilitas diplomasi publik dipertanyakan di negara-negara Muslim akibat kebijakan luar negeri yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai yang dipromosikan.



5. *Pilar dan Strategi Diplomasi Publik:*

Tujuan Diplomasi Publik: Menurut Jay Wang, tujuan utama diplomasi publik adalah mempromosikan kebijakan negara, membentuk nilai-nilai dan sikap positif, serta meningkatkan pemahaman antara negara dan masyarakat internasional.

6. *Strategi Komunikasi:*

Diplomasi publik memerlukan strategi komunikasi yang melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, sektor swasta, NGO, media, dan individu. Ini bertujuan untuk mengoptimalkan pengumpulan dan penyebaran informasi demi kepentingan nasional. Secara keseluruhan, sejarah diplomasi publik menunjukkan evolusi dari praktik komunikasi tradisional menuju pendekatan yang lebih interaktif dan responsif terhadap dinamika global saat ini (Lee, 2011).

Diplomasi publik relevan dalam penelitian ini dimana *Hallyu* disebarkan di Tiongkok melalui penggunaan media cetak dan digital dengan konten musik ataupun film dan penyebaran ini dilakukan oleh individu maupun kelompok. Tujuan utamanya adalah membentuk citra positif Korea Selatan di mata masyarakat Tiongkok (Amalia, 2018). Diplomasi publik Korea Selatan terhadap Tiongkok terkhusus melalui fenomena *Hallyu* yang telah menjadi alat yang strategis dalam memperkuat hubungan bilateral dan meningkatkan citra negara. Diplomasi publik Korea Selatan terhadap Tiongkok akan terus dipengaruhi oleh perkembangan di Semenanjung Korea Selatan dan dinamika geopolitik di Asia. Upaya ini untuk



memperkuat hubungan melalui budaya dan nilai – nilai akan menjadi kunci utama dalam membangun hubungan yang lebih stabil dan saling menguntungkan bagi masa depan (Lee, 2011).

C. Soft Power

Sejarah *soft power* dalam hubungan internasional mengacu pada kemampuan suatu negara untuk mempengaruhi negara lain melalui daya tarik budaya, nilai-nilai politik, dan kebijakan luar negeri yang tidak memaksa, berbeda dengan *hard power* yang mengandalkan kekuatan militer atau ekonomi (Chernykh, 2023). Korea Selatan menyusun strategi *Soft power Diplomacy* yang dikembangkan oleh Joseph S. Nye dengan memanfaatkan *Hallyu* yang saat ini sangat populer di kalangan masyarakat Tiongkok (Lestari, 2022). Contoh awal *soft power* dapat dilihat pada pengaruh budaya Prancis pada abad ke-18 dan ke-19, ketika seni, mode, dan filosofi Prancis mendominasi Eropa. Selain itu, setelah Perang Dunia II, Amerika Serikat menggunakan *soft power* melalui penyebaran nilai-nilai demokrasi dan budaya pop, seperti film dan musik.

Definisi dari *soft power* adalah kemampuan untuk mendapatkan apa yang diinginkan melalui daya tarik dan persuasi, bukan melalui paksaan atau ancaman. Ini mencakup pengaruh budaya, ideologi, dan kebijakan luar negeri yang menarik bagi negara lain (Chernykh, 2023). Berbicara tentang *soft power*, konsep ini adalah alat utama dalam diplomasi modern, sering disebut juga sebagai *Soft Diplomacy*. Melalui *Soft Diplomacy* ini, sebuah negara dapat

mempengaruhi negara lain tanpa menggunakan kekuatan militer atau ekonomi langsung. Misalnya, Tiongkok saat ini telah menjadi kekuatan ekonomi



global yang signifikan dan bahkan mampu bersaing dengan Amerika Serikat memicu perang dagang antara kedua negara. Salah satu strategi yang digunakan Tiongkok untuk mencapai dominasi ekonomi adalah dengan melakukan investasi besar-besaran di berbagai negara. Melalui investasi ini, Tiongkok perlahan-lahan mengambil alih sektor perdagangan negara-negara tersebut, menggantikan produk lokal dan akhirnya mendominasi pasar. Ini merupakan bagian dari strategi ekonomi dan politik global Tiongkok (Lestari, 2022).

Joseph Nye (2008) mendefinisikan *Soft power* sebagai kemampuan suatu negara untuk mempengaruhi perilaku dan keputusan negara lain tanpa menggunakan kekuatan militer atau koersif. Menurut Nye, *Soft power* terdiri dari tiga unsur utama yaitu:

- Budaya: Nilai-nilai dan tradisi budaya yang dimiliki oleh suatu negara dapat menarik perhatian dan mempengaruhi negara lain.
- Sistem Nilai: Nilai-nilai politik dan moral yang dipegang oleh suatu negara dapat mempengaruhi keputusan dan perilaku negara lain.
- Kebijakan: Kebijakan luar negeri yang diambil oleh suatu negara dapat menunjukkan komitmen dan integritasnya, sehingga mempengaruhi kepercayaan dan dukungan dari negara lain.

Menurut Nye, Amerika Serikat memiliki semua sumber daya untuk menjadi pelaksana *Soft power* yang terdepan. Amerika menggunakan *Soft power* untuk mencapai tujuan politik luar negerinya dengan cara yang damai tidak koersif. Keuntungan yang diperoleh Amerika melalui *Soft power* lain adalah meningkatnya prospek kerja sama dan keterbukaan ekonomi



dengan negara lain, serta meningkatnya kekaguman terhadap nilai-nilai dan aspirasi Amerika.

Joseph Nye (2004) menyatakan bahwa *soft power* hanya efektif jika pihak lain mengakui dan mendukung upaya tersebut. Dalam masyarakat bebas, *soft power* tidak dapat dikontrol oleh pihak yang ingin mendominasi dengan cara paksa. Nye juga menekankan bahwa mayoritas *soft power* Amerika diproduksi oleh Hollywood, Harvard, Microsoft, dan Michael Jordan. Oleh karena itu, *soft power* hanya dapat digunakan jika pihak lain memiliki harapan yang sama dan tekad untuk mencapai tujuan bersama. Maka ada sebuah mekanisme yang diperlukan untuk mengelola praktik *soft power*. Mekanisme ini, yang kemudian muncul, berkembang, dan digunakan dalam pemanfaatan *soft power* di Eropa dan Norwegia, dikenal sebagai *soft diplomacy*.

Kata kunci dari diplomasi kontemporer (*the new public diplomacy*) telah menekankan istilah *soft power* yang diperkenalkan oleh Nye (2008) pada akhir masa perang dingin, sebagai ekspresi kemampuan aktor untuk mendapatkan hal yang diharapkan dari lingkungan internasional dengan menggunakan daya tarik budaya bukan menggunakan kekuatan militer atau ekonomis. Diplomasi publik juga menjadi mekanisme penyebaran *soft power*, meskipun diplomasi publik tidak sama dengan *soft power* seperti pengertian *hard power* yang sama dengan militerisasi. Pada kenyataannya, sangat mungkin seorang aktor menjalankan diplomasi publik tanpa gunakan *soft power*, seperti contohnya Korea Utara. Atau



menggunakan *soft power* tanpa melalui diplomasi publik, seperti Eire (Yani dkk, 2018).

Negara lain juga menggunakan *Soft Diplomacy* untuk mencapai kepentingan nasional mereka melalui berbagai cara, seperti bahasa, budaya, pendidikan, dan pariwisata, tergantung pada kebutuhan masing-masing negara. Korea Selatan, misalnya, menggunakan diplomasi *soft power* melalui penyebaran budaya populer mereka, yang dikenal sebagai *Hallyu* atau *Hallyu* (Lestari, 2022). Dalam konteks modern, fenomena *Hallyu* merupakan contoh *soft power* yang berhasil, di mana budaya pop Korea Selatan telah menyebar secara global meningkatkan citra dan pengaruh Korea Selatan di dunia internasional. Pemerintah Korea Selatan mendukung ekspor budaya ini sebagai strategi diplomasi publik untuk memperbaiki citra nasional dan meningkatkan hubungan dengan negara lain (Chernykh, 2023). Fenomena *Hallyu* ini pertama kali dikenal di Tiongkok pada akhir 1990-an dan sejak saat itu telah menyebar ke seluruh dunia. Popularitas budaya Korea, termasuk K-pop dan drama, menjadi fokus utama kebijakan luar negeri Korea Selatan.

Diplomasi *soft power* berbasis budaya ini dianggap sangat efektif dalam menyebarkan pengaruh Korea di dunia internasional. Dampak dari *Hallyu* tidak hanya menguntungkan ekonomi Korea Selatan tetapi juga memperkuat citra dan merek negara tersebut di mata internasional. Kebijakan ini pertama kali dirumuskan pada masa pemerintahan Kim Dae-jung, yang memosisikan

nya sebagai "*President of Culture*" dan mendukung pengembangan industri budaya dengan mengesahkan undang-undang untuk promosi industri budaya



serta mengalokasikan dana sebesar 148,5 juta dolar AS untuk proyek-proyek tersebut (Lestari 2022).

Implikasi dalam Hubungan Internasional yaitu penguatan citra nasional dimana *Soft power* membantu negara memperbaiki dan memperkuat citra mereka di mata dunia. Seperti, Korea Selatan berhasil mengubah persepsi negatif tentang dirinya melalui penyebaran budaya pop yang menarik bagi banyak negara, terutama di Asia. Implikasi kedua yaitu diplomasi budaya, negara menggunakan *Soft power* sebagai alat diplomasi untuk membangun hubungan yang lebih baik dengan negara lain. Ini dapat menciptakan saluran komunikasi yang lebih baik dan mengurangi ketegangan yang ada (Chernykh,2023).

Dalam konteks politik luar negeri Korea Selatan, negara ini tentu memiliki sejumlah kepentingan politik yang harus diutamakan, salah satunya adalah memajukan dan mengembangkan sektor perekonomiannya. Untuk mencapai tujuan tersebut, Korea Selatan memerlukan dukungan dari negara-negara yang berpengaruh dalam sektor ekonomi, seperti Tiongkok. Oleh karena itu, Berdasarkan konsep diplomasi R.P. Barston, diplomasi tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga melibatkan artis, idola, media massa, perusahaan musik, dan masyarakat umum. Strategi Korea Selatan ini kemudian menunjukkan hasil positif bagi kepentingan nasionalnya, karena Korea Selatan dan Tiongkok mulai menyepakati perjanjian perdagangan bebas dengan tujuan

tingkatkan intensitas perdagangan antara keduanya. Keberhasilan *soft* r diplomacy Korea Selatan juga terlihat dari citra positif negara tersebut di



mata masyarakat Tiongkok dan dunia, di mana banyak orang yang tertarik untuk berwisata, melanjutkan pendidikan, bekerja, atau menetap di Korea Selatan. Melalui strategi ini, Korea Selatan berhasil memenuhi beberapa kepentingan nasionalnya (Lestari 2022).

Komponen utama dari *soft power* mencakup beberapa elemen yang saling terkait dan berkontribusi terhadap kemampuan suatu negara untuk mempengaruhi negara lain tanpa menggunakan paksaan. Salah satu komponen utamanya yaitu budaya. Daya tarik budaya mencakup berbagai aspek seperti seni, musik, sastra dan tradisi yang dapat menciptakan ketertarikan di kalangan masyarakat internasional. Negara yang memiliki budaya yang kaya dan menarik dapat membangun citra positif dan meningkatkan pengaruhnya di dunia.

Adapun juga program pertukaran budaya seperti pertukaran pelajar, festival dan pameran budaya. Salah satu program pertukaran pelajar yang masif di Korea Selatan yaitu ***Global Korea Scholarship (GKS)*** yang tidak hanya berperan sebagai pemberi beasiswa tetapi juga berperan sebagai aktor diplomasi publik melalui pendekatan *people-to-people diplomacy*. Hal ini untuk menciptakan individu – individu yang bertindak sebagai duta Korea Selatan di berbagai negara. Para penerima diharapkan dapat menyebarkan citra positif Korea Selatan ke negara asal mereka dan ke dunia internasional. Tujuan utama dari GKS adalah memperkuat kerja sama internasional melalui berbagai program pertukaran Pendidikan. Selain itu, program ini bertujuan untuk

tingkatkan posisi Korea Selatan sebagai penyedia Bantuan Pembangunan
i (*Official Development Assistance, ODA*) bagi negara – negara



berkembang, serta memperbaiki citra negara dengan membangun jaringan global yang luas dan berkelanjutan (Zamzami, 2022).

Korea Selatan telah aktif memanfaatkan diplomasi publiknya melalui seni dan festival budaya yang memperkuat hubungannya dengan Tiongkok salah satu inisiatifnya yaitu Festival budaya Korea Selatan – Tiongkok, dalam rangka memperingati 30 tahun hubungan diplomatik antara Korea Selatan dan Tiongkok, berbagai acara budaya diselenggarakan untuk mempererat hubungan kedua negara. Salah satu contohnya adalah "*China Ceramics Art Exchange*" yang diadakan pada bulan Desember, melibatkan seniman keramik dari kedua negara (Korea Net, 2022) .

Adapun festival musik K-Pop yang mana pemerintah Korea Selatan bersama dengan agensi dan perusahaan hiburan telah mempromosikan budaya K-Pop ke negara-negara seperti Tiongkok sejak akhir 1990-an. Upaya ini telah meningkatkan popularitas K-Pop secara global dan dimanfaatkan sebagai soft power dalam politik luar negeri Korea Selatan (Timbuleng dkk, 2023). Festival seni dan pameran budaya juga diadakan sebagai festival yang berfungsi untuk memperkenalkan nilai – nilai serta tradisi suatu negara kepada publik asing yang dapat membantu membangun pemahaman dan hubungan yang baik antara negara (Melissen, 2005).

Budaya juga berkontribusi pada pembuatan identitas nasional yang kuat karena negara dengan identitas budaya yang jelas dapat lebih mudah diterima dan dihargai oleh masyarakat internasional. Media massa termasuk film, musik dan program televisi memainkan peran penting dalam menyebarkan budaya



suatu negara ke seluruh dunia. Konten media yang positif dapat meningkatkan citra negara dan menarik perhatian public internasional. Melalui budaya inilah negara dapat mempromosikan nilai – nilai mereka (Melissen, 2005).

Soft power merupakan konsep yang sangat penting dalam diplomasi budaya, di mana ia merujuk pada kemampuan suatu negara untuk mempengaruhi negara lain melalui daya tarik budaya, nilai-nilai, dan ideologi, bukan melalui paksaan atau iming-iming material. Diplomasi budaya, sebagai bagian dari *soft power*, berfokus pada pertukaran budaya dan pendidikan untuk memperkuat hubungan antar negara serta mencapai tujuan nasional (Soesilowati, 2017).

Secara keseluruhan, *Soft power* menjadi komponen penting dalam strategi hubungan internasional modern, di mana negara berusaha untuk membangun pengaruh dan hubungan yang positif melalui daya tarik budaya dan nilai-nilai yang mereka tawarkan.

D. Penelitian Terdahulu

Dalam penulisan penelitian ini, tentunya penulis akan menyajikan beberapa referensi yang relevan dengan judul penelitian ini. Penelitian pertama yang relevan dengan judul penelitian ini yaitu, ***“Pengaruh SM Entertainment Dalam Perkembangan Diplomasi Budaya Korea Selatan”*** yang ditulis oleh Mutiara Megantari Putri (2022). Penelitian ini membahas bagaimana kesuksesan dari dunia industri film, ketergantungan Korea Selatan pada SM

tainment sebagai alat diplomasi budaya serta musik Korea Selatan yang mpak bagi negara tetangga khususnya Tiongkok dan peran dari



pemerintah Korea Selatan dalam mendukung industri hiburan sebagai bagian dari strategi untuk meningkatkan citra positif pasca perang. Fokus utama dalam masalah ini adalah meningkatkan ekonomi dan kekhawatiran tentang dampak sosial dari globalisasi budaya termasuk homogenisasi budaya. Penelitian ini juga membahas perubahan dalam pemerintahan Korea Selatan mempengaruhi dukungan terhadap industri hiburan dan SM Entertainment serta meningkatnya popularitas K-pop dan budaya Korea Adapun tantangan dari negara lain yang juga berusaha untuk memanfaatkan *soft power* mereka sendiri, menciptakan persaingan yang dapat mempengaruhi posisi Korea Selatan di panggung global (Putri, 2022).

Penelitian kedua yaitu ***“Pengaruh Fenomena Hallyu (K-pop dan K-drama) Terhadap Perilaku Konsumtif Penggemarnya Perspektif Islam”*** yang ditulis oleh Banowati Azelia Putri Yuliawan (2022). Penelitian ini membahas bagaimana pengaguman terhadap idola dapat berpotensi menyebabkan perilaku berlebihan yang bertentangan dengan ajaran Islam dan ditekankan betapa pentingnya menyaring budaya asing yang masuk. Meskipun menyukai budaya asing diperbolehkan, penggemar harus tetap berpegang pada prinsip – prinsip Islam untuk menghindari perilaku konsumtif yang berlebihan. Penelitian ini memberikan wawasan tentang interaksi antara budaya pop Korea Selatan dan nilai – nilai Islam serta dampaknya terhadap perilaku konsumsi di kalangan remaja (Yuliawan, 2022).



Penelitian ketiga yaitu ***“Budaya Korean Wave Sebagai Komoditas Industri Media Indonesia”*** yang ditulis oleh Mahardika (2022). Penelitian ini

membahas tentang fenomena globalisasi budaya yang mempengaruhi industri media di Indonesia dan bagaimana *Hallyu* ini telah mendominasi konten kebudayaan di Indonesia. Menjelaskan bagaimana produk-produk kebudayaan Korea, seperti film, drama, musik K-Pop, fashion, dan kuliner, telah menjadi komoditas yang mendominasi konten kebudayaan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Mencakup sejarah perkembangan *Hallyu*, dampaknya terhadap masyarakat dan industri media, serta peran media sosial dalam penyebaran budaya Korea secara global (Mahardika, 2022).

Tabel 1. Matriks Penelitian Terdahulu

No.	Tahun/ Nama/Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	2022/ Mutiara Megantari Putri, Ika Riswanti & Muhammad Faizal Alfian/ Pengaruh SM Entertainment Dalam Perkembangan Diplomasi Budaya Korea Selatan.	SM Entertainment memainkan peran penting dalam mendorong diplomasi budaya Korea Selatan dengan memanfaatkan popularitas artis-artisnya untuk mendukung agenda pemerintah. Para artis dari agensi ini sering digunakan untuk menarik perhatian wisatawan, baik melalui peran mereka sebagai duta pariwisata maupun dalam kunjungan pemerintah ke negara lain untuk mempromosikan kebijakan luar negeri Korea Selatan. Ketergantungan Korea Selatan pada SM Entertainment sebagai alat diplomasi budaya yang berdampak bagi negara tetangga. Perubahan dalam pemerintah Korea Selatan mempengaruhi dukungan terhadap industri hiburan dan SM Entertainment. SM Entertainment berkontribusi



		secara signifikan dalam mendukung diplomasi budaya Korea Selatan melalui kekuatan soft power, membantu negara ini mencapai tujuannya di tingkat global.
2.	2022/ Banowati Azelia Putri Yuliawan, Ganjar Eka Subakti/ Pengaruh Fenomena <i>Hallyu</i> (K-Pop dan K-Drama) Terhadap Perilaku Konsumtif Penggemarnya Perspektif Islam.	Kemajuan zaman dan proses globalisasi mempermudah masuknya budaya asing ke berbagai negara, termasuk budaya Korea Selatan yang mulai dikenal luas di Indonesia. Dalam pandangan Islam, mengidolakan seseorang tidak dilarang selama dilakukan secara wajar, tanpa sikap berlebihan dan tidak meniru budaya atau kebiasaan yang bertentangan dengan ajaran agama. Membeli merchandise idola secara berlebihan dianggap sebagai perilaku boros dan mubazir yang jelas dilarang dalam Islam. Penelitian ini memberikan wawasan tentang interaksi antara budaya pop Korea Selatan dan nilai – nilai Islam yang berdampak di kalangan remaja.
		Sebagai salah satu penerima budaya Korea, Indonesia menjadi pasar yang aktif dalam mengonsumsi budaya tersebut melalui media massa maupun platform daring. Kehadiran budaya Korea di Indonesia membawa dampak positif dan negatif. Di sisi positif, <i>Hallyu</i> membuka peluang bagi Indonesia untuk menjalin hubungan yang lebih baik dengan Korea Selatan melalui kerja sama bilateral di berbagai bidang, seperti budaya, ekonomi, politik, dan lainnya.



	2022/ Mahardika, Eni Maryani, Edwin Rizal/ Budaya Korean Wave Sebagai Komoditas Industri Media Indonesia.	Namun, sisi negatifnya adalah munculnya imperialisme budaya yang berpotensi melemahkan budaya lokal Indonesia karena semakin berkurangnya peminat budaya lokal. Penelitian ini menunjukkan bahwa <i>Hallyu</i> berhasil mencapai eksistensinya secara global tidak hanya berkat dukungan masyarakat sebagai penyebar konten budaya, tetapi juga melalui peran aktif pemerintah Korea Selatan yang menjadikannya prioritas dalam kebijakan nasional.
--	---	---

Sumber: Penulis, 2024

Adapun perbedaan dari penelitian – penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis rancang dengan judul ***“Dampak Diplomasi Budaya Korea Selatan Terhadap Hubungan Bilateral Korea Selatan – Tiongkok”***.

Pada penelitian penulis menjelaskan bagaimana penyebaran *Hallyu* yang terpengaruh dari adanya perkembangan teknologi. Dampak yang terjadi dari kesuksesan industri film dan musik yang dapat meningkatkan minat wisatawan asing ke Korea Selatan. Penelitian penulis mengungkapkan bahwa diplomasi budaya Korea Selatan yang terwujud dalam fenomena *Hallyu* telah memperkuat hubungan bilateral antara Korea Selatan dan Tiongkok. Melalui penyebaran *Hallyu* menjadi sarana yang sangat efektif bagi Korea Selatan untuk



promosikan citra positifnya pada Tiongkok yang merupakan mitra dagang besar bagi Korea Selatan. Pentingnya berkomunikasi dan menjaga dialog pemerintah kedua negara yang bertujuan mengurangi ketegangan.

Hallyu mencakup berbagai aspek budaya populer seperti musik K-pop, drama televisi, film, dan fashion, yang telah berhasil menarik perhatian dan minat masyarakat Tiongkok. Melalui pemahaman yang lebih baik tentang satu sama lain melalui budaya populer, kedua negara dapat membangun fondasi yang kuat untuk kerja sama di berbagai bidang lainnya seperti ekonomi dan politik. Hal ini menunjukkan bahwa kekuatan budaya dapat menjadi alat yang efektif dalam diplomasi internasional dan pengembangan hubungan antarnegara.

